

## **MENELUSURI LATAR BELAKANG KOLABORASI ANTARINSTANSI PEMERINTAH KOTA BOGOR DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SAAT PANDEMI COVID19**

### ***EXPLORING THE BACKGROUND OF INTER-AGENCY COLLABORATION IN SOCIAL ASSISTANCE DISTRIBUTION DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN BOGOR CITY***

**Lili Hermawan<sup>1</sup>, Berliana Kartakusumah<sup>2\*</sup>, Muhammad Luthfie<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Administrasi Publik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Djuanda,

\*Korespondensi: Berliana Kartakusumah, Email: berliana.kartakusumah@unida.ac.id

#### **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to comprehend the aspects of intergovernmental collaboration in Bogor City, as evidenced by the utilization of the SALUR Kota Bogor application. This study employs a qualitative descriptive approach, with the Mayor of Bogor and collaborators from the Department of Communication and Informatics, Department of Social Affairs, and Department of Population and Civil Registration as informants. These informants were interviewed, and the interview outcomes were analyzed alongside secondary data obtained from literature studies. The analysis yielded findings that the collaboration background was a shared understanding of the existence of inaccurate data regarding social aid recipients. Building synergy, unity, and the mayor's directive were motivating factors for collaboration. Another finding is that collaboration aims to foster social solidarity, social cohesion, and cultivate a service-oriented bureaucratic culture. Another objective is to ensure accountability for the social aid budget in the regional budget. Collaborators contributed to their respective roles effectively. From a leadership perspective, the Mayor of Bogor successfully facilitated effective collaboration among the three departments and transformed social aid issues into shared concerns. In managing social aid, the employed management reflects the characteristics of New Public Services (NPS), enabling effective collaboration. The collaboration policy to address the recipient data issue required significantly fewer inputs compared to the achieved outputs.*

*Keywords: Collaboration, Social Aid, New Public Services.*

#### **ABSTRAK**

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pemahaman aspek kolaborasi antarinstansi pemerintahan di Kota Bogor yang muncul dalam penggunaan aplikasi SALUR Kota Bogor. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan informan Walikota Bogor dan kolaborator dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kemudian informan tersebut diwawancara dan hasil wawancara dianalisis beserta data sekunder yang bersumber dari studi literatur. Sehingga dari hasil analisis tersebut mendapatkan temuan bahwa kolaborasi ditujukan untuk membangun solidaritas sosial dan kohesifitas sosial serta membangun kultur birokrasi yang melayani. Tujuan lainnya agar APBD untuk bantuan sosial dapat dipertanggungjawabkan. Kolaborator telah berkontribusi menjalankan perannya sesuai tugasnya masing-masing. Dari aspek kepemimpinan, Walikota Bogor sukses mendorong kolaborasi yang efektif di antara tiga dinas untuk dan menjadikan permasalahan bantuan sosial menjadi masalah bersama. Dalam penanganan bantuan sosial, manajemen yang dilakukan mencerminkan karakter New Public Services (NPS) sehingga kolaborasi berjalan efektif dimana Kebijakan kolaborasi untuk menyelesaikan masalah data penerima bantuan input yang dibutuhkan jauh lebih sedikit dari output yang dicapai.

Kata Kunci: Kolaborasi, Bantuan Sosial, New Public Services.

## PENDAHULUAN

Krisis akibat pandemi COVID-19 telah menyebabkan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selain mengancam kesehatan, pandemi ini juga merembet ke sektor ekonomi, sosial, kesejahteraan, dan pendidikan. Pertumbuhan ekonomi yang tadinya maju pesat terhenti tiba-tiba, memicu resesi global yang berdampak pada berbagai negara. Indonesia juga terkena dampak, dengan pertumbuhan ekonomi menyusut drastis menjadi 2,07 persen pada tahun 2020, disertai peningkatan tingkat pengangguran yang signifikan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah pengangguran mencapai 8,75 juta orang pada Februari 2021, naik sebanyak 26,26 persen dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi.

Kondisi serupa terjadi di Kota Bogor, di mana pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 0,53 persen pada 2020 dan tingkat pengangguran serta tingkat kemiskinan juga meningkat secara drastis.

Dampak ekonomi pandemi ini lebih terasa oleh kelompok ekonomi menengah ke bawah. Kelompok ini tidak hanya menghadapi kenaikan harga barang dan jasa, tetapi juga kehilangan pekerjaan sebagai sumber pendapatan. Risiko pengangguran ini lebih tinggi di kalangan penduduk dengan pendapatan rendah, pendidikan rendah, perempuan, serta rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan atau janda.

Selain dampak ekonomi, krisis ini juga memengaruhi pemenuhan gizi keluarga, terutama pada kelompok berpendapatan rendah yang kesulitan membeli makanan bergizi. Untuk meredam dampak sosial dan ekonomi ini, pemerintah meluncurkan berbagai program bantuan seperti bantuan

sembako, BLT, insentif subsidi listrik, Kartu Prakerja, subsidi gaji, BLT untuk UMKM, bantuan pulsa untuk ASN, dan kuota gratis untuk pembelajaran jarak jauh.

Namun, distribusi bantuan ini menjadi tantangan tersendiri. Basis data calon penerima bantuan sering tidak akurat dan terdapat tumpang tindih dalam tanggung jawab berbagai lembaga dalam pendistribusiannya. Di tengah kondisi darurat, kebijakan dan program bantuan harus dirumuskan dengan cepat. Oleh karena itu, transformasi digital seperti program SALUR di Kota Bogor menjadi solusi yang diharapkan untuk mempercepat penyaluran bantuan. Aplikasi SALUR memungkinkan warga untuk memeriksa status penerimaan bantuan dengan memasukkan NIK.

Pentingnya kolaborasi dalam mengatasi krisis ini juga ditekankan. Pembuat kebijakan publik perlu berkolaborasi dengan dinamis, fleksibel, dan adaptif, serta melibatkan berbagai lembaga dan organisasi. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci penting dalam mengatasi krisis ini, terutama dalam hal penyaluran bantuan dan pemulihan jangka panjang.

Dalam rangka menghadapi permasalahan distribusi bantuan dan kolaborasi, Kota Bogor merancang program SALUR yang melibatkan tiga dinas terkait. Aplikasi SALUR memberikan akses bagi warga untuk memeriksa status penerimaan bantuan dan memastikan penyaluran tepat sasaran. Meskipun ada potensi konflik antar dinas terkait data, kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam mengatasi tantangan yang ada.

Secara keseluruhan, pandemi COVID-19 telah mengakibatkan dampak serius terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama ekonomi. Upaya pemerintah dalam

memberikan bantuan dan mengatasi tantangan distribusi bantuan melalui kolaborasi dan transformasi digital menjadi langkah penting dalam meredam dampak krisis ini.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan informan sebagai berikut:

1. Informan Kunci ada 4 (tiga) orang yakni Walikota Bogor Bima Arya Sugiharto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Bogor Rahmat Hidayat, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) Kota Bogor Sujatmiko Baliarto, dan Mantan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Anggraeny Iswara.
2. Informan Utama yaitu Kepala Bidang e-Government Diskominfo Kota Bogor Oki Trifasiasta, Kepala Bidang Data dan Penyuluhan Sosial Dinsos Kota Bogor Okto Muhammad Ikhsan, dan Kepala Seksi Kerja Sama & Inovasi Pelayanan, Disdukcapil Kota Bogor Mugi Lastono
3. Informan Pendukung yaitu Kepala Dinas Sosial Kota Bogor Fahrudin, Kepala Seksi Data dan Informasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Dinsos Kota Bogor Rully Hasanul Basri dan Kepala Seksi Aplikasi Kominfo Kota Bogor Achmad Sandy

Teknik pengumpulan data dengan Data Primer yaitu wawancara mendalam dengan seluruh informan sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen dan literatur, laporan evaluasi kegiatan, berita media, dan jurnal ilmiah. kemudian data yang dikumpulkan divalidasi dengan triangulasi dan selanjutnya dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Semua informan seperti ditampilkan dalam Tabel 4.1 memahami kolaborasi dalam penanganan data penerima bantuan sosial yang dilakukan tiga dinas di Pemkot Bogor memiliki latar belakang yang utama yakni data penerima bantuan sosial tidak valid sehingga penyaluran bantuan menjadi salah sasaran. Masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 juga banyak yang luput dari jangkauan bantuan sosial yang berasal dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kota. Walikota Bogor Bima Arya Sugiharto menuturkan:

“Jadi COVID-19 menimbulkan berbagai dampak ekonomi. Warga yang terdampak secara ekonomi tidak semuanya dapat tercukupi oleh anggaran dari APBN/APBD. Banyak yang membutuhkan tapi anggaran tidak mencukupi. Itu Satu. Kedua, warga butuh cepat sedangkan APBD maupun APBN butuh proses. Ketiga, sering kali ada persoalan pemutahiran data sehingga banyak yang tidak dapat padahal seharusnya dapat. Oleh karena itu, saya memerintahkan kepada Dinas Sosial Dukcapil, Diskominfo untuk berkolaborasi membangun suatu sistem, suatu platform.”

Sementara itu, Kadiskominfo Rahmat Hidayat menyatakan:

“April 2020 masuk pandemi. Problemnnya data. Data penerima bantuan sosial dari pusat tidak bisa diakses masyarakat. Kemudian, pas pandemi datang lagi dua bantuan. Pertama, bantuan sosial dari APBD Provinsi, bantuan sosial berbentuk natura dan uang. Kedua dari Kota yang berbentuk uang. Masyarakat bingung kondisinya dia masuk bantuan yang mana.”

**Tabel 1 Latar Belakang Kolaborasi  
Latar Belakang Kolaborasi**

Kategori Informan	Latar Belakang Kolaborasi	Kategori Informan	Latar Belakang Kolaborasi
<b>Informan Kunci</b>		Sosial Dinsos Okto Muhammad Ikhsan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data penerima bantuan perlu di-<i>update</i>.</li> <li>• Keandalan data kemiskinan perlu diuji.</li> </ul>
Wali Kota Bogor Bima Arya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Warga yang terdampak secara ekonomi tidak semuanya dapat tercukupi oleh anggaran dari APBN/APBD. Warga membutuhkan bantuan cepat sedangkan APBN/APBD membutuhkan proses.</li> <li>• Ada persoalan pemutahiran data sehingga banyak warga yang berhak tidak mendapat bantuan.</li> </ul>	Kepala Seksi Kerja Samadan Inovasi Pelayanan, Disdu kcapil Mugi Lasto no	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu Dinsos melakukan verval penerimabantuan sosial.</li> <li>• Mempercepat pengecakan data dan status penerima bantuan sosial dengan menggunakan aplikasi.</li> </ul>
Kadisko minfo Rahmat Hidayat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat bingung tentang sumber dana bantuansosial.</li> </ul>	<b>Informan Pendukung</b>	
Kadisdukcapil Sujatmiko Baliarto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesulitan memverifikasi status kependudukan</li> <li>• Menghindari penerima bantuan ganda.</li> <li>• Pemanfaatan digital dalam <i>good government</i>.</li> </ul>	Dinas Sosial Kota Bogor Fahrudin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih banyak keluhan dari masyarakat yang belum mendapatkan bantuan.</li> <li>• Akses untuk mendapatkan bantuan sangat tergantung pada petugas, RT/RW, sementara tenagadan waktu pegawai Dinsos terbatas.</li> </ul>
Mantan Kadin sos Anggraeny Iswara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menangani warga yang terdampak pandemi dengan meng-<i>update</i> data warga miskin.</li> <li>• Banyak warga yang mengajukan diri sebagai penerima bantuan sementara kriteria penerima bantuan berubah-ubah.</li> </ul>	Kasi Data dan Informasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Dinsos Rully Hasanul Basri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah provinsi, pusat dan daerah dalam keadaan genting untuk menentukan cara supaya masyarakat mendapatkan bantuan pada saat melakukan isolasi di rumah.</li> <li>• Kriteria penerima bantuan masih belum jelas.</li> <li>• Data penerima bantuan masih dobel dan belum sepenuhnya valid.</li> <li>• Pemda belum siap melakukan pendataan warga terdampak pandemi.</li> </ul>
<b>Informan Utama</b>		Kasi Aplikasi Kominfo Kota Bogor Achmad Sandy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat yang sedang isoman membutuhkan bantuan.</li> <li>• Penerima bantuan sosial tidak boleh dobel.</li> </ul>
Kabid e-Government Diskominfo Okta Trifasianta Kabid Data dan Penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semua pihak tidak yakin data penerima bansos sudah <i>oke</i>.</li> <li>• SALUR dapat menangkap penerima bantuan sosial yang belum terdata.</li> <li>• Banyak warga yang m belum mendapatkan bantuan.</li> </ul>		

Sumber : Hasil wawancara informan, 2020

Pandemi COVID-19 yang datang tiba-tiba menyebabkan pemerintah di berbagai tingkatan tidak siap mengantisipasi berbagai masalah yang muncul terutama ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menyalurkan bantuan sosial. Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Daerah dalam keadaan genting untuk menentukan bagaimana caranya supaya masyarakat mendapatkan bantuan pada saat melakukan isolasi di rumah. Pemerintah membatasi aktivitas masyarakat.

Mantan Kadinsos Kota Bogor Anggraeny Iswara mengungkapkan:

*“Siapa yang nyangka ini pamdemi. Situasi terjadi tiba-tiba dan kita tidak siap. Untuk menyelesaikan tidak mudah. Masyarakat dan kadang anggota Dewan tidak mengerti. Ini data amburadul. Emang data siapa? Itu data given. Data yang mana yang amburadul? DTKS. Silakan complain ke pusat. Karena banyak sekali DTKS secara kenyataannya di lapangan yang miskin sekali tidak masuk padahal sudah kita usulkan. Kita tidak mengerti apa tools mereka untuk memfilter.”*

Hampir semua informan menuturkan kekisruhan data penerima bantuan sosial makin terasa setelah muncul pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang dikutip berbagai media pada Minggu, 12 April 2020, menyusul diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di lima wilayah di Jawa Barat yakni Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Bekasi dan Kota Depok.

Dalam pemberitaan media, Gubernur Jawa Barat menyatakan:

*“Pemerintah bersedia menjamin kebutuhan makanan warga selama PSBB. Tidak boleh ada orang yang kelaparan di tanah Jawa Barat, siapapun itu Insya Allah kami bantu.”*

Gubernur pada waktu itu tidak menyebutkan warga yang akan dibantu adalah yang terdampak secara ekonomi. Masyarakat menganggap semua yang terdampak COVID-19 akan mendapatkan bantuan sehingga Dinsos Kota Bogor menghimpun data semua calon penerima bantuan lewat Kelurahan tanpa ada panduan, standar, dan regulasi yang jelas karena bersifat darurat. Kelurahan dianggap sebagai pihak yang paling mengetahui kondisiarganya.

Mengenai hal tersebut, Kasi Data dan Informasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Dinsos Kota Bogor Rully Hasanul Basri menuturkan:

*“Kita kadang mencari data di kelurahan. Kita data semuanya. Ternyata di situ ada warga yang kaya yang ikut didata karena Kelurahan mendata seperti dikatakan Pak Ridwan Kamil mendata warga yang terkena COVID-19 tanpa kriteria miskin. Waktu itu memang sifatnya urgent. Belum punya pegangan, belum punya SOP, putusan, dan lain-lain. Akhirnya didata. Dapatlah hampir 194.000 orang untuk menerima bantuan provinsi. Data kacau karena masih manual.”*

Selain Dinas Sosial, diketahui ada pihak yang menghimpun data calon penerima bantuan sosial seperti dari Dinas Pertanian, Dinas UMKM, Dinas Perhubungan dan lain-lain. Data-data tersebut diusulkan kepada Dinas Sosial dan digabungkan dengan data dari Kelurahan. Ternyata, sebagian dari mereka telah diusulkan Kelurahan dan diusulkan kembali oleh dinas-dinas itu. Akibatnya, karena tidak sempat di-cleansing dan disandingkan pada tahap awal penyaluran bantuan ada terjadi double penerima bantuan.

Pendataan calon penerima bantuan sosial secara manual mengakibatkan penerima manfaat tidak terverifikasi. Warga yang NIK-nya salah

ketik atau berbeda bisa masuk menjadi penerima bantuan sosial arena data tanpa disandingkan terlebih dahulu dengan data kependudukan di Dukcapil. Lembaga tersebut memiliki data kependudukan by name, by address, by NIK yang merupakan SIN (Single Identification Number). Satu penduduk memiliki satu NIK. Jadi, NIK yang dijadikan acuan sudah memiliki SSN (Social Security Number) yang bersifat nasional. Jadi, sudah tidak mungkin ada duplikasi.

Terdapat sekitar 194.000 orang calon penerima bantuan yang diserahkan ke Pemerintah Provinsi. Namun, faktanya tidak seperti yang dijanjikan Gubernur karena tidak semuanya mendapatkan bantuan karena Pemerintah Provinsi menetapkan kuota sesuai dengan anggaran yang tersedia. Gubernur mengadakan meeting dengan kepala daerah se-Jabar dan menyampaikan perubahan kriteria. Masyarakat yang dibantu adalah keluarga miskin yang terdampak COVID. Kota Bogor mendapatkan data penerima bantuan dengan kuota 54.000 atau hanya 27,83 persen dari data yang diajukan.

Mantan Kadinsos Kota Bogor Anggraeny Iswara menggambarkan: "Kemudian ada rapat dengan provinsi. Di sana disebutkan itu tidak semuanya mendapatkan bantuan ya. Yang dibantu adalah orang yang tidak punya aset, orang yang kehilangan pekerjaan, ada ciri-cirinya yang memang rumahnya juga. Intinya tidak semua orang mendapatkan bantuan dari Provinsi Jawa Barat. Harus difilter lagi. Kebijakannya berubah-ubah." Data calon penerima bantuan yang ditetapkan Provinsi Jawa Barat masih banyak yang dobel. Pemkot Bogor melakukan penyisiran data kembali karena penerima bantuan harus padan dengan data Disdukcapil. Akhirnya, dari 54.000 orang didapatkan kuota kuota sekitar 46.000 yang semuanya tidak termasuk dalam data DTKS Kemensos. Data ini pun belum benar-benar bersih

karena belum disandingkan dengan indikator lain seperti "kaya dan miskin".

Bantuan dari Provinsi Jawa Barat keluar pada 15 April 2020 untuk 46.000 Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS). Bantuan sosial berupa bantuan tunai dan pangan nontunai senilai Rp500 ribu selama 4 bulan. Rinciannya, bantuan tunai sebesar Rp150 ribu per keluarga per bulan dan bantuan pangan nontunai.

Kasi Data dan Informasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Dinsos Kota Bogor Rully Hasanul Basri menggambarkan:

*"Setelah penyaluran bantuan sosial untuk 46.000 orang itu, banyak yang complain. Mereka mengatakan warga yang punya mobil dapat bantuan sementara yang miskin tidak. Bisa jadi yang miskin tidak menerima bantuan sosial sesungguhnya karena NIK-nya belum e-KTP. Itu indikator penyebab tidak menerima bantuan. Dinsos tidak punya kepentingan. Selagi datanya benar kami kirimkan ke provinsi. Oleh provinsi harus dipadankan dengan Disdukcapil. Di situlah terjadi kisruh. Kadang, warga miskin malas mengurus KTP dengan alasan berbelit-belit dan sebagainya. Itu menjadi penyebab dia tidak mendapat bantuan."*

Warga yang tidak mendapatkan bantuan sosial mulai resah. Walikota Bogor Bima Arya pada Selasa, 28 April 2020, atau pada hari pertama kerja setelah sembuh dari COVID-19, meminta masyarakat yang merasa berhak tapi belum mendapatkan bantuan untuk melapor ke hotline yang tersedia atau datang langsung ke posko aduan bantuan sosial di Balaikota. Ribuan warga Kota Bogor akhirnya datang ke Balaikota dengan bermodalkan KTP dan KK. Pada saat itu, masyarakat belum mendapatkan informasi bahwa setelah pendaftaran akan ada proses verval.

Kadiskominfo Kota Bogor Rahmat Hidayat mengatakan:

*“Awalnya, warga yang non-DTKS berbondong-bondong ke Balaikota. Pernyataan Pak Wali bahwa akan ada bantuan. Penuhlah Balaikota.”*

Petugas pendaftaran yang dikerahkan dari berbagai dinas dan instansi di Kota Bogor kesulitan untuk melakukan verifikasi dan menandai pendaftar yang datang ke Balaikota. Dinas Sosial hanya memiliki tiga kategori data berdasarkan sumber bantuan (APBD Kota, Provinsi dan bantuan pusat) dalam bentuk excel sehingga sulit untuk mengecek agar tidak ada penerima bantuan yang double. Sebagai solusinya, staf Disdukcapil berinisiatif menciptakan sebuah sistem yang sederhana yang menjadi cikal bakal aplikasi SALUR.

Kasi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Kota Bogor Mugi Lastono mengatakan:

*“Ini yang menjadi trigger awal akhirnya kita bikin sore hari itu manual dulu. Saya sebelumnya telepon ke staf di kantor untuk membuat aplikasi pencarian. Dibuat tiga kategori bantuan sehingga penerima tidak double. Akhirnya dibuat cikal bakal Salur. Gampang. Kalau database sudah ada tinggal bikin apa yang mau dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Hari itu jam 2 saya telepon. Malamnya diuji coba dan besok paginya sudah pakai aplikasi.”*

Walikota Bogor menugaskan Diskominfo untuk meningkatkan kemampuan aplikasi tersebut sekaligus memberi nama Sistem Kolaborasi dan Solidaritas untuk Rakyat (SALUR) yang mulai diresmikan penggunaannya pada 1 Mei 2020. Dinsos kemudian melakukan pengolahan data penerima bantuan untuk penerima bantuan tahap kedua yang akan direalisasikan pada Juli 2020. Data-

data tersebut di-cleansing sehingga tidak terjadi data ganda.

Pada saat yang bersamaan Provinsi Jawa Barat melakukan penyisiran sekitar 104.000 data penerima bantuan di Kota Bogor yang tanpa berkoordinasi terlebih dahulu. Tidak jelas apakah yang di-cleansing itu data penerima bantuan provinsi atau bantuan kota. Namun, sudah dapat dipastikan semua KK yang terdata tidak mungkin mendapatkan bantuan dari provinsi sehingga Walikota Bogor berinisiatif mengeluarkan APBD Kota Bogor untuk bantuan sosial berupa uang tunai senilai Rp500 ribu untuk tiap KK. APBD Kota Bogor akan menjangkau sebanyak 19.904 warga yang tidak ter-cover dari provinsi.

Penyaluran bantuan yang bersumber dari APBD Kota Bogor mulai dilakukan pada Senin, 27 April 2020, setelah terbit Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 027.45-312 tanggal 26 April 2020 tentang penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan Virus Corona atau COVID-19.

Ternyata masih banyak warga yang tidak mendapatkan bantuan sosial. Beruntung datang bantuan sosial dari Kemensos untuk warga miskin baru terdampak COVID-19 yang merupakan data Non-DTKS. Warga yang belum mendapatkan bantuan dari APBD Kota Bogor dialihkan ke skema bantuan Kemensos sebanyak 29.320 orang. Jadi, Kemensos memberikan bantuan untuk dua kategori data yakni DTKS dan Non-DTKS.

Kisruh data penerima bantuan belum berakhir. Provinsi Jawa Barat tampaknya ingin membantu warga yang sudah terdata di DTKS dengan mengambil data dari Pusdatin Kemensos sehingga bantuan provinsi menyasar DTKS dan Non-DTKS. Akhirnya, ada 46.000 penerima bantuan provinsi dari DTKS. Berita data penerima bantuan keluar hal ini menjadi kisruh karena basis datanya

merupakan data lama yang belum di-update.

Mantan Kadinsos Kota Bogor Anggraeny Iswara mengatakan:

“Provinsi mengambil data dari DTKS. Membingungkan. Provinsi minta data katanya akan mengirimkan bantuan untuk yang terdampak COVID-19 yang diutamakan data DTKS dulu. Ternyata betul di perjalanan diberhentikan oleh pusat. Kata pusat mengapa mengambil data DTKS? Ini kan wewenangnya pusat.”

Kasi Data dan Informasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Dinsos Kota Bogor Rully Hasanul Basri menambahkan:

“Provinsi niatnya bagus mau membantu warga yang benar-benar miskin. Dia mengambil data DTKS. Salahnya, waktu itu tidak minta data yang ter-update dan langsung menarik data dari Pusdatin. Kalau tidak salah sekitar Maret-April. Setelah itu, Kemensos membaca kenapa provinsi membantu DTKS? Sudah saja itu ranahnya Kemensos. Tidak usah diotak-atik. Akhirnya, provinsi hanya satu bulan memberikan bantuan. Bantuan selanjutnya diberikan untuk non-DTKS saja. Provinsi tidak usah masuk data DTKS.”

Pemkot Bogor terus melakukan perbaikan data setelah diresmikan aplikasi SALUR. Melalui aplikasi ini, masuk sekitar 54.000 pendaftar mandiri. Dinsos menarik data itu untuk diverval ke kelurahan. Data tersebut juga disandingkan dengan Disdukcapil karena aplikasi SALUR terintegrasi data kependudukan. Ada sekitar 47.000 KK yang layak mendapatkan bantuan. Mereka dimasukkan dalam data penerima bantuan Pemkot Kota Bogor. Waktu itu kuotanya hanya 23.000 orang sesuai kemampuan APBD Kota. Sisanya,

dimasukkan Kemensos untuk mendapatkan BLT.

Data-data penerima bantuan sosial, terutama yang bersumber dari Kemensos, kembali berubah. Kasi Data dan Informasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Dinsos Kota Bogor Rully Hasanul Basri menuturkan:

“Ternyata ada sumber data lain di luar Dinsos. Saya tidak paham asalnya dari mana. Bisa jadi ada Kementerian atau dari anggota Dewan yang mengirimkan data langsung ke Kemensos. Akhirnya, data kami di-cleansing oleh Kemensos. Di situlah banyak yang complain karena mereka menerima bantuan sosial di bulan pertama tetapi pada bulan kedua tidak mendapatkan bantuan. Sementara tetangganya yang kaya malah mendapatkan bantuan.”

Beberapa informan menyatakan ada anggota Dewan datang ke Dinsos membawa data usulan konstituennya untuk mendapatkan bantuan. Tapi, Dinsos berpegangan bahwa data prioritas penerima bantuan dari data kelurahan yang masih hangat. Data tersebut bisa dimasukkan kalau ada kuota bantuan. Data yang diajukan anggota Dewan banyak ditolak karena berbagai alasan. Pertama, kuota bantuan tidak mencukupi. Kedua, KK yang mereka usulkan sudah diusulkan Kelurahan sehingga kalau disetujui bisa dobel karena NIK-nya sama. Mereka lantas berinisiatif mengirimkan data ke Kemensos. Pusat bisa mengambil sumber data dari mana-mana tanpa diverval kabupaten/kota. Maka, muncul data penerima bansos yang tidak diusulkan Dinsos sekitar 4.000 penerima untuk bantuan terakhir dari Kemensos yakni Tahap V (Mei 2020) dan Tahap VI (Jui 2020).

**Tabel 2 Jumlah Penerima Bantuan Sosial**

Kategori Bantuan	Jumlah Penerima	Prosentase (%)
------------------	-----------------	----------------

<b>Sosial</b>	<b>(KK)</b>	
<b>DTKS</b>		
Penerima BPNT/BSP	70697	40,29
Penerima Bantuan Tunai Langsung (BLT)	3139	1,79
Penerima PKH	1103	0,63
Jumlah	74939	42,71
<b>Non-DTKS</b>	<b>38342</b>	
Penerima BLT	38342	21,85
Penerima Bantuan Walikota	28906	16,48
Penerima Bantuan Gubernur	33262	18,96
Jumlah Total	100510	57,29
<b>Total</b>	<b>175449</b>	<b>100,00</b>

Sumber: SALUR Kota Bogor, 2020

Berdasarkan data di aplikasi SALUR, total jumlah penerima bantuan sosial di Kota Bogor sebanyak 175.449 KK yang terdiri atas 74.939 KK atau 42,71 persen penerima bantuan dari data DTKS dan 100.510 KK atau 57,29 persen dari kategori Non-DTKS. Perincian kategori dan jumlah penerima bantuan sosial disajikan pada Tabel 4.2. Untuk kategori DTKS, mayoritas menerima bantuan BPNT/BSP dengan jumlah sebanyak 70.697 KK atau 40,29 persen.

Komposisi penerima bantuan sosial dari Non-DTKS hampir merata dimana penerima BLT (APBN/Kemensos) sebanyak 38.347 KK (21,85 persen), penerima bantuan APBD Provinsi (Gubernur) sebanyak 33.262 KK (18,96 persen) dan penerima bantuan APBD Kota (Walikota) berjumlah 29.906 KK (16,48 persen).

Dari paparan mengenai latar belakang munculnya gagasan untuk kolaborasi, jajaran Pemkot Bogor dari walikota hingga kadis dan staf memiliki

kemampuan untuk menangkap masalah publik yang muncul akibat kekisruhan data penerima bantuan sosial yang berujung pada terjadinya bantuan yang salah sasaran dan warga yang berhak tidak menerima bantuan sosial tersebut. Masalah tersebut merupakan kebutuhan-kebutuhan manusia yang perlu di atasi (Jones, 1991).

Kemampuan menemukan dan merumuskan masalah merupakan tahapan awal untuk membuat kebijakan publik yang tepat. Sebuah perumusan masalah yang baik dapat menjadi sumber pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan. Perumusan masalah yang baik juga dapat menjadi peluang bagi pemerintah untuk memadukan pandangan-pandangan yang saling kontradiktif dan mendesain kebijakan yang baru (Dunn, 2002).

## KESIMPULAN

Merujuk pada hasil dan pembahasan yang telah dilakukan pada Bab IV dapat disimpulkan bahwa Kolaborator cukup memahami aspek-aspek kolaborasi. Pemahaman aspek kolaborasi antarinstansi pemerintahan di Kota Bogor dalam penggunaan aplikasi SALUR sangat beragam apabila dilihat dari aspek latar belakang kolaborasi, alasan melakukan kolaborasi, tujuan kolaborasi, peran dalam kolaborasi, dan aspek kepemimpinan dalam kolaborasi. Para kolaborator memahami kolaborasi memiliki kesamaan latar belakang utama yaitu adanya data penerima bantuan sosial yang tidak valid sehingga ditemukan banyak warga yang berhak tidak menerima bantuan atau mereka yang mendapatkan bantuan penyalurannya menjadi salah sasaran.

## SARAN

Saran-saran yang dapat disampaikan berdasarkan pada hasil penelitiannya, pertama Pemkot Bogor perlu terus membangun kolaborasi antarinstansi untuk mengatasi persoalan publik yang berbeda dengan memperhatikan dinamika sosial kemasyarakatan yang melingkupinya. Kolaborasi yang terus menerus akan memperkuat persamaan persepsi terhadap sebuah persoalan serta rasa kebersamaan untuk mencari solusi yang efektif guna memecahkan masalah tersebut.

Manajemen kebijakan publik yang mencerminkan karakter New Public Services (NPS) perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar masyarakat dapat berpartisipasi mendukung setiap kebijakan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative platforms as a governance strategy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(1), 16–32. <https://doi.org/10.1093/jopart/mux030>
- Barany, L. J., Simanjuntak, I., Widia, D. A., & Damuri, Y. R. (2020). Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19: Sudahkah Menjangkau Sesuai Sasaran. CSIS. Jakarta.
- Brand, R., & Gaffikin, F. (2007). Collaborative planning in an uncollaborative world. *Planning Theory*, 6(3), 282–313. <https://doi.org/10.1177/1473095207082036>
- Butcher, J. R., & Gilchrist, D. J. (2020). Collaboration For Impact: Lesson from The Field. <https://doi.org/10.22459/CFI.2020>
- Chrislip, D. D. (2002). The collaborative leadership fieldbook: A guide for citizens and civic leaders. In *The Jossey-Bass nonprofit and public management series*.
- Coates, B. E. (2001). Smart Government Online, Not Online. *Journal of The Public Manager*, Vol. Winter.
- Creswell, W. J. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Denhardt, J. ., & Denhardt, R. . (2007). *The New Public Service (Expanded E)*. New York: M.E. Sharpe, Inc.
- Dunn, W. . (2002). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gash, A. (2017). Cohering Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 27(1)213–216. <https://doi.org/10.1093/jopart/muw047>
- Haryatmoko. (2011). *Etika Publik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Heryana, A. (2018). Informan dan Pemilihan Informan pada Penelitian Kualitatif.
- Hirawan, F. B. (2020). Optimizing the Distribution of the Social Assistance Program during the COVID-19 Pandemic. *Centre for Strategic and International Studies*, (June), 1–7.
- Hood, C. (1991). A Public Management for All Seasons? *Public Administration*, 69(1).

- <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x>.
- Howell, F. (2001). Social Assistance - Theoretical Background', in 'Social Protection in the Asia and Pacific (I). Manila: Ortiz, Asian Development Bank.
- Hughes, O. E. (1998). Public Management and Administration. London: Macmillan Education UK.
- Islamy, M. I. (2009). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jakarta.
- Jones, C. O. (1991). Pengantar kebijakan publik (Cetakan 1; R. Ismanto & B. Nashir, Eds.). Jakarta: Rajawali.
- Justice, (January, 28 2021). Retrieved from <https://igj.or.id/stories-from-across-the-countryproblems-in-the-distribution-of-government-social-aid-in-handling-covid19-the-peoples-economic-recovery/?lang=en>
- Keban, Y. T. (2019). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Ed. Revisi).
- Kominfo. (2021). Digitalisasi Bansos Perlu Perhatikan Kesenjangan Daerah. Retrieved November 17, 2021, from <https://kominfo.go.id/> website: <https://kominfo.go.id/content/detail/33743/digitalisasi-bansos-perlu-perhatikan-kesenjangan-daerah/0/berita>
- McCusker, K., & Gunaydin, S. (2015). Research using qualitative, quantitative or mixed methods and choice based on the research. *Perfusion*, 7(October 30). <https://doi.org/10.1177/0267659114559116>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2009). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L. J. (2018). Metode Penelitian Kualitatif (38th ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(2), 83–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.363>
- Nur Fitria, F., Wijaya, S. R., & Abhipraya, F. A. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Dari Pemerintah Untuk Disalurkan Kepada Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 6(1), 40–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/jpi.v6i1.5330>
- O'Neil, K., & Onike, C. (2021). Modernizing Access to the Safety Net. In *The Rockefeller Foundation*.
- Oktorialdi. (2021). Percepatan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Bappenas.
- Penulis Allain-Dupré, D., Chatry, I., Michalun, V., & Moisis, A. (2020). The territorial impact of COVID-19: managing the crisis across levels of government. *OECD Tackling Coronavirus*, (April), 2–44.
- Prokompim. (2020). Berikut Hasil Survei Persepsi Risiko Covid-19 di Kota Bogor. Retrieved September 28, 2020, from [kotabogor.go.id](http://kotabogor.go.id) website: [https://kotabogor.go.id/index.php/s/how\\_post/detail/14457](https://kotabogor.go.id/index.php/s/how_post/detail/14457)

- Rahardjo, M. (2017). Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya. Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Januari 2017. (Unpublished).
- Rees-Jones, A., D'Attoma, J., Piolatto, A., & Salvadori, L. (2020). COVID-19 Changed Tastes for Safety-Net Programs. NBER Working Paper No. 27865, 1–20.
- Rubado, M. (2019). The Role of Local Government Collaboration in Legacy Cities.
- Saleh, C., & Hanafi, I. (2020). Kolaborasi Pemerintahan (1st ed.). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Silalahi, R. (2021). Problems in the Distribution of Government Social Aid in Handling Covid-19 & the People's Economic Recovery. Indonesia for Global
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kebijakan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Evaluasi. Bandung: CV Alfabeta.
- Tirrell, D. N., & Clay, J. A. (2010). Strategic Collaboration in Public and Nonprofit Administration: A Practice-Based Approach to Solving Shared Problems. New York: Routledge.
- Torring, J. (2019). Collaborative innovation in the public sector: the argument. *Public Management Review*, 21(1), 1–11. <https://doi.org/10.1080/14719037.2018.1430248>
- Wahyuni, D. (2021). Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. *Info Singkat Bidang Kesejahteraan Sosial*, XIII(15).
- Wargadinata, E. (2016). Kepemimpinan Kolaboratif. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 8(1), 1–12.
- Warm, D. (2011). Local Government Collaboration for a New Decade: Risk, Trust, and Effectiveness. *State and Local Government Review*, 43(1), 60–65. <https://doi.org/10.1177/0160323x1400436>
- World Bank. (2020). Scaling Up Social Assistance Payments as Part of the COVID-19 Pandemic Response. Retrieved from <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/655201595885830480-0090022020/original/WBG2PxScalingUpSocialAssistancePaymentsasPartoftheCovid19PandemicResponse.pdf>